

Rudy Susmanto Apresiasi Kinerja Pasangan Ade Yasin-Iwan Setiawan

BOGOR (IM) - Walaupun tidak sempurna dan ada kekurangan dalam kepemimpinannya, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto tetap mengapresiasi kinerja pasangan Ade Yasin-Iwan Setiawan yang akan berakhir pada 30 Desember mendatang.

Rudy Susmanto pun mengaku akan mencoba melanjutkan dan menyempurnakan program kerja dari visi misi Ade Yasin-Iwan Setiawan yang belum tercapai hingga akhir Bulan Agustus 2024.

"Memang di masa kepemimpinan Ade Yasin-Iwan Setiawan, dalam perjalanannya ada 'tantangan' yang luar biasa hingga Iwan Setiawan harus naik menjadi Bupati Bogor. Walaupun seperti itu, kami mengapresiasi atas sumbangs-

Ade Yasin dengan program Panca Karsanya," ujar Rudy Susmanto usai memimpin Rapat Paripurna Laporan Kinerja Bupati Bogor di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong, Kamis malam (30/11).

Ia meminta warga Kabupaten Bogor tidak hanya melihat dari kekurangan, tetapi juga mengapresiasi atas upaya langkah pembangunan yang telah dilakukan sebelumnya.

"Sebagai warga Kabupaten Bogor kita jangan hanya memandang minor kepemimpinan Bupati Bogor, tetapi ada juga hal yang positif atau warisan, hingga dengan hak itu kita sama-sama semangat berjuang membangun Kabupaten Bogor agar lebih baik lagi," pinta politisi Partai Gerindra tersebut. ● **gio**

2 Jembatan di Bogor Rusak Diterjang Banjir, Akses Warga Terganggu

BOGOR (IM) - Hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu belakangan membuat sejumlah aliran sungai di Kecamatan Sukaraja meluap. BPBD Kabupaten Bogor menyebut ada dua jembatan rusak diterjang air sungai meluap.

"Pertama di Desa Cikeas, dikarenakan terdapat tanggul jebol dan meluapnya aliran kali yang membuat tersumbatnya sampah di jembatan tersebut sehingga mengakibatkan jembatan roboh," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Muhammad Adam Hamdani, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/12).

Jembatan tersebut merupakan jembatan gantung yang menjadi akses masyarakat desa di Sukaraja. Situasi saat ini, jembatan sudah tidak bisa digunakan.

"Situasi akhir untuk saat

ini jembatan tersebut sudah tidak bisa digunakan," ucap Adam.

Kedua, jembatan rusak terjadi di antara Desa Sukatani dan Desa Sukaraja. Jembatan yang rusak menghubungkan kedua desa tersebut. Penyebabnya serupa, yaitu karena meluapnya air sungai.

"Dikarenakan meluapnya aliran kali, sehingga tergerusnya fondasi sebuah jembatan penghubung antar Desa Sukaraja dan Desa Sukatani mengakibatkan terdampaknya jembatan tersebut," ujarnya.

Adam mengatakan akses jalan antara kedua desa tersebut terganggu imbas jembatan rusak. Jembatan tersebut kini hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki.

"Situasi akhir tim sudah melakukan pemasangan garis peringatan. Untuk saat ini, jembatan tersebut hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki," pungkasnya. ● **gio**



IDN/ANTARA

LAYANAN KELILING DETEKSI TBC GRATIS DI MEDAN

Petugas kesehatan mengukur lingkaran perut warga saat pelaksanaan layanan keliling deteksi tuberkulosis di UPT Pukesmas Belawan, Medan, Sumut, Jumat (1/12). Pemkot Medan bekerja sama dengan rumah sakit daerah setempat menggelar layanan keliling deteksi TBC gratis bagi warga Kota Medan dengan tujuan siaga terhadap penyakit menular seperti TB dan HIV.

SEBUT HANYA KESALAHPAHAMAN

Bupati Bogor Bantah Tolak Jabat Tangan Dandim

BOGOR (IM) - Bupati Bogor, Iwan Setiawan meminta maaf usai beredar video dirinya disebut-sebut ogah berjabat tangan dengan Dandim 0621/Kabupaten Bogor, Letkol (Kav) Gan Gan Rusgandara. Video viral tersebut diambil saat Iwan berkunjung ke Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mendampingi Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin ketika meninjau jalur tambang, Minggu (19/11). Dalam video tersebut, Iwan terlihat berjabat tangan dengan sejumlah pejabat, termasuk Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyu Anggoro. Namun, dia melewatkan menjabat tangan Gan Gan yang sudah memberikan hormat dan posisinya berada tepat di sebelah kiri.

Sikap Iwan itupun menjadi sorotan dan ramai diperbincangkan. Iwan kemudian mendatangi Markas Kodim 0621/Kabupaten Bogor untuk bertemu dengan Gan

Gan didampingi jajarannya dan juga Kapolres Bogor pada Kamis (30/11).

Iwan menyampaikan permintaan maaf kepada Dandim 0621/Kabupaten Bogor dan keluarga besar TNI atas kekhilafannya. "Dari hati yang paling dalam, tidak ada sedikit pun saya bersikap merendahkan atau membuat kesan tidak hormat terhadap keluarga besar TNI Kabupaten Bogor," ujar Iwan dalam video yang diterima.

Iwan mengatakan, yang terjadi merupakan sebuah kesalahpahaman. Ia mengaku tidak ada permasalahan yang terjadi antara dia dan Gan Gan. "Saya berharap setelah kejadian ini, kita kembali semula. Kita secara pribadi tidak ada permasalahan apa pun dari sebelum kejadian sampai hari ini. Kami di Bogor, Forkopimda sangat kompak untuk menjaga kondusifitas di Kabupaten Bogor khususnya pileg dan pilpres," ujarnya. ● **gio**



IDN/ANTARA

PAMERAN BATIK BORDIR DAN TENUN NUSANTARA

Pengunjung melihat baju dan kain batik pada Pameran Batik Bordir dan Tenun Nusantara 2023 di Graha Manggala Siliwangi, Bandung, Jabar, Jumat (1/12). Pameran bertema Legenda Wastra Nusantara itu diikuti oleh pelaku UMKM dan perajin batik dari berbagai daerah di Indonesia untuk pelestarian kain khas Indonesia dan promosi dalam mendukung peningkatan penjualan serta penggunaan produk wastra khas dalam negeri.

APBD 2024 Kota Bogor Fokus Pelayanan Dasar Masyarakat

Berdasarkan masukan yang disampaikan oleh DPRD Kota Bogor, DPRD Kota Bogor bersama TAPD Kota Bogor menyepakati untuk menyesuaikan beberapa pos belanja yang dikhususkan untuk menangani permasalahan anak, pelajar serta sekaligus dukungan untuk anak usia dini.

BOGOR (IM) - DPRD Kota Bogor menggelar rapat paripurna dengan agenda penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor tahun anggaran 2024, Kamis (30/11). Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan dari tingkat komisi-komisi hingga Badan Anggaran, se-

luruh anggota DPRD Kota Bogor menyetujui penetapan APBD 2024 Kota Bogor.

Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, menyampaikan bahwa APBD 2024 Kota Bogor akan difokuskan untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat.

Berdasarkan masukan yang disampaikan oleh

DPRD Kota Bogor, Atang menyebutkan DPRD Kota Bogor bersama TAPD Kota Bogor menyepakati untuk menyesuaikan beberapa pos belanja yang dikhususkan untuk menangani permasalahan anak, pelajar serta sekaligus dukungan untuk anak usia dini.

"DPRD Kota Bogor bersama dengan Pemerintah Kota Bogor menyepakati untuk penguatan program yang secara langsung dengan permasalahan sosial dan kemiskinan," ujar Atang.

Guna mendukung program pelayanan dasar dan menyiapkan anggaran yang cepat tanggap, DPRD Kota Bogor memberikan catatan kepada Pemerintah Kota Bogor agar penggunaan BTT Tahun 2024

dengan nilai Rp98,5 miliar harus benar-benar dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk diketahui postur APBD 2024 Kota Bogor terdiri dari Pendapatan Daerah yang disepakati sebesar Rp3,035 triliun dan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,437 triliun serta Pendapatan Transfer sebesar Rp1,597 triliun.

Sedangkan untuk Belanja Daerah disepakati sebesar Rp3,107 triliun dan Pembiayaan Daerah disepakati dengan rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp84,145 miliar, Penge-luaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp12,294 miliar dan Pembiayaan Netto sebesar Rp71,851 miliar.

Dalam rapat paripurna, Wali Kota Bogor, Bima Arya, menyampaikan untuk pendapatan daerah, selain tetap meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah, Bima turut memerintahkan Dinas PMPTSP dan Dinas PUPR segera mengevaluasi SOP untuk mengakselerasi proses perizinan, khususnya Persetujuan Bangunan Gedung.

"Saya minta kepada dinas agar tidak ada yang bermain-main. Saya juga meminta kepada seluruh anggota dewan yang mengetahui ada ASN yang bermain agar segera dilaporkan ke Sekda, Wali Kota dan Wakil Wali Kota," kata Bima.

Lebih lanjut, Bima, me-

nyampaikan didalam APBD 2024, DPRD Kota Bogor dan Pemkot Bogor menyetujui pengalokasian anggaran untuk melakukan pembangunan dua unit sekolah baru di Kecamatan Bogor Utara dan Kecamatan Bogor Timur, guna menjawab persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Bima juga memastikan bahwa program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tetap dilanjutkan dengan anggaran Rp33,3 miliar dan program bantuan siswa miskin sebesar Rp9 miliar.

"Perlu kami tegaskan juga bahwa penerima bantuan-bantuan sosial ini merupakan warga miskin Kota Bogor yang terdaftar pada aplikasi SOLID," tegas Bima.

Terakhir, Bima, menyampaikan paripurna penetapan APBD 2024 merupakan paripurna terakhirnya sebagai Wali Kota Bogor bersama Dedie A. Rachim sebagai Wakil Wali Kota Bogor.

Guna mensukseskan Pilkada 2024, di dalam APBD telah dialokasikan anggaran hibah sebesar Rp80 miliar. "Persetujuan Rancangan APBD 2024 ini merupakan paripurna terakhir bagi saya dan Dedie Rachim selaku Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor.

Sebagai bentuk doa dan harapan dari kami, agar Kota Bogor semakin maju, konsisten merawat keberagaman dan fokus terhadap meningkatkan kesejahteraan warganya," tutupnya. ● **pra**

Serapan APBD Kab. Bogor Capai 71,86 Persen

KABUPATEN BOGOR (IM) - Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tahun anggaran 2023 kini telah mencapai 71,86 persen atau Rp7,242 triliun.

Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Achmad Wildan di Cibinong, Bogor, Kamis, menyebutkan bahwa angka 71,86 persen ini merupakan realisasi belanja daerah hingga akhir November 2023.

"Realisasinya Rp7,242 triliun atau 71,86 persen," ungkap Wildan.

Anggaran belanja daerah Kabupaten Bogor ditargetkan senilai Rp9,72 triliun, sesuai yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bogor bersama DPRD setempat dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023.

Angka belanja daerah sebesar Rp9,72 triliun ini terdiri dari belanja operasi sebesar Rp6,78 triliun, belanja modal Rp1,3 triliun, belanja tak terduga (BTT) Rp25 miliar, hingga belanja transfer sebesar Rp1,6 triliun. Sebelumnya, Presiden

RI Joko Widodo (Jokowi) mengkritik dana mengendap senilai triliun rupiah pada kas pemerintah pusat dan daerah yang kembali terulang pada tahun anggaran 2023.

Presiden Jokowi dalam agenda penyerahan Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2024 di Istana Negara Jakarta, Rabu, memerintahkan agar serapan dana tersebut dioptimalkan dalam tiga pekan ke depan.

"Artinya dalam tiga minggu ini akan keluar uang bertiliun-triliun, ini kita ulang-ulang terus setiap tahun," katanya.

Jokowi mengatakan bahwa arahan untuk mempercepat penyerapan anggaran telah ia sampaikan sejak sembilan tahun yang lalu.

"Tadi saya minta informasi ke Menteri Dalam Negeri, berapa sih realisasi sampai saat ini? Baru 64 persen daerah. Pusat juga 74 persen. Ini sudah tinggal tiga minggu, masih 64, sama 74," katanya.

Ia mengingatkan penyerapan anggaran 2024 akan dimulai per Januari, sehingga sisa anggaran yang masih terlokasi di APBN maupun APBD untuk kegiatan 2023 harus segera dihabiskan. ● **gio**

Kabupaten Cianjur Terancam Krisis Guru ASN

CIANJUR (IM) - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mencatat, dibutuhkan waktu sekitar 10 tahun agar seluruh tenaga guru honorer di daerah itu diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Dengan penghitungan tersebut, Cianjur pun berada dalam ancaman krisis guru berstatus ASN mulai tahun depan. Plt Kepala Disdikpora Cianjur, Ruhli di Cianjur mengatakan, jumlah guru SD saat ini sekitar 11.510 orang, yang 4.350 di antaranya berstatus ASN, dan selebihnya tenaga honorer.

Sedangkan, pada saat bersamaan, setiap tahun ada ratusan guru berstatus ASN masuk masa pensiun.

"Untuk tingkatan SMP dari 4.865 orang guru, yang berstatus ASN sebanyak 2.357 dan sisanya tenaga honorer." "Sehingga Cianjur krisis guru yang idealnya

untuk SD ada 13.500 guru dan SMP sebanyak 5.250 guru."

"Sedangkan yang berstatus ASN saat ini yang terisi hanya 40 persen termasuk PPPK," kata Ruhli.

Krisis tersebut diperparah dengan masuknya masa pensiun sebanyak 400 guru sepanjang tahun 2023. Lalu, tahun depan diperkirakan sekitar 600 guru yang pensiun.

Tahun 2022 ada sekitar 700 guru yang pensiun, sehingga banyaknya guru honorer masih belum sebanding dengan kebutuhan maksimal.

Bahkan hingga saat ini, untuk kebutuhan guru di wilayah selatan Cianjur, rata-rata satu sekolah hanya diisi satu guru ASN yakni kepala sekolah.

"Untuk menuntaskan krisis guru di Cianjur butuh waktu selama 10 tahun dengan catatan setiap tahun pemerintah mengangkat

700 orang guru menjadi P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)."

"Kecuali pusat menambah kuota hingga ribuan orang per tahun, kemungkinan akan cepatnya guru di Cianjur berstatus ASN," kata Ruhli lagi. Ketua PGRI Cianjur Sukirman, mengatakan krisis guru berstatus ASN sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir dan terbantu dengan program P3K.

Selama ini, satu sekolah baik SD dan SMP di wilayah selatan hanya memiliki 2-3 guru ASN, sedangkan sisanya tenaga honorer. "Sebagian besar tenaga honorer yang mengisi kekosongan guru di setiap sekolah di Cianjur."

"Kami berharap ada penambahan kuota untuk ASN guru, baik pengangkatan menjadi PNS ataupun P3K, sehingga guru di Cianjur bisa lebih diperhatikan nasibnya," ungkap dia. ● **pra**



IDN/ANTARA

LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN INDONESIA

Pelaku pasar modal memberikan arahan dan pelatihan kepada mahasiswa tentang cara berinvestasi lewat pasar modal saat acara Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia di Kampus UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangsel, Banten, Jumat (1/12). Acara digagas oleh BNI Sekuritas dan diikuti mahasiswa beberapa PTN seperti UIN, UI, UNJ dan Untirta ini bertujuan memberikan panduan bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan bisnis dan menentukan tujuan karier di pasar modal.